



LAPORAN PELAKSANAAN

PROGRAM BANYUWANGI HIJAU

PERIODE: Juli-Oktobre 2022

PENGANTAR

Program Banyuwangi Hijau (BWH) adalah inisiatif pengembangan pengelolaan sampah berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang menggabungkan model pengelolaan sampah perkotaan dalam sampah sirkular dengan menyediakan solusi daur ulang yang dapat meningkatkan nilai ekonomi sampah. BWH mendorong keterlibatan multi-pihak untuk meningkatkan penyediaan layanan persampahan yang terintegrasi didukung partisipasi aktif masyarakat. Hal ini diharapkan mendorong pemulihan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, sebagaimana misi Program Banyuwangi Rebound.

Secara umum, tujuan BWH adalah meningkatkan cakupan layanan persampahan yang berkelanjutan, dan memenuhi prinsip cost recovery, serta berkontribusi terhadap penurunan prevalensi stunting, melalui kemitraan multi-pihak. Hal akan dicapai melalui lima tujuan program, yakni:

- Memperkuat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah dan mengembangkannya menjadi UPTD – Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Persampahan.
- Mendorong praktik perilaku pengelolaan sampah berkelanjutan pada masyarakat.
- Mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang memberikan keuntungan ekonomi.

- Mengembangkan lingkungan yang mendukung bagi keterlibatan swasta dalam investasi dan pengoperasian sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
- Menguji coba skema inovasi pendanaan untuk persampahan.

BWH diselenggarakan pada periode 2022-2024 dengan menerapkan integrasi komponen program yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target JAKSTRANAS Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tahun 2025, yakni peningkatan penanganan sampah hingga 70% dan pengurangan timbulan sampah hingga 30%. Komponen program adalah Tata Kelola dan Kelembagaan, Sistem Operasional Persampahan, Komunikasi Perubahan Perilaku, dan Inovasi Pendanaan.



MANAJEMEN PROGRAM

Laporan ini meliputi kegiatan pada periode Juli hingga Oktober 2022 dimana beberapa keluaran program penting berhasil dicapai, ditambahkan beberapa pelaksanaan kegiatan yang menjadi embrio penyelenggaraan pelayanan sampah pada tahun 2023. Upaya memperkenalkan program pada mitra program nasional juga dilakukan untuk memperoleh dukungan atas pelaksanaan BWH dan menyebarkan pengalaman pelaksanaan program yang dipetik selama ini. Dimana kemudian terlaksana kunjungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kesehatan, USAID Indonesia, USAID-Clean Cities Blue Ocean (CCBO), Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Indonesia Solid Waste Management Program (Bank Dunia) pada Oktober 2022 untuk memahami pelaksanaan program secara umum dan mempelajari proses pemicuan STBM Pilar 4 pada BWH.

Pada periode ini juga dikembangkan konsep kolaborasi desa dalam pelayanan sampah untuk mendukung percepatan penyiapan tata kelola persampahan di desa. Bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kab. Banyuwangi - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, tim BWH mengembangkan konsep pendampingan desa untuk mengelola pelayanan sampah bekerjasama dengan UPT Persampahan.

BWH juga melakukan penambahan tenaga pelaksana program untuk mendukung implementasi kegiatan yang direncanakan diselenggarakan pada tahun 2023. Beberapa diantaranya: Implementation Coordinator, BCC Support. BWH juga memobilisasi Konsultan Pelatihan untuk mengembangkan rancangan kegiatan pelatihan berikut pengembangan materinya dan memproses rekrutmen untuk Konsultan Community Participation yang akan membantu memformulasikan pengelolaan retribusi sampah yang bisa mendorong rutinitas pembayaran masyarakat dengan menggunakan sistem yang akuntabel dan transparan.

1.1 Keluaran Program BWH

Selama empat bulan pelaksanaan program, BWH mencatat berbagai keluaran program yang dihasilkan oleh masing-masing komponen sebagai berikut:

- Proses pelibatan desa dalam mendukung pelaksanaan pelayanan sampah oleh UPT Persampahan dilaksanakan melalui serangkaian pertemuan yang melibatkan Kepala Desa, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, DLH, Dinas Kesehatan, dan perangkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banyuwangi.
- Mutual Check Awal (MC 0) atas konstruksi TPS Balak dilakukan dan disepakati hasilnya, selanjutnya penyesuaian desain konstruksi dilakukan dengan tetap memenuhi target fungsi dan kapasitas pengelolaan sampah.
- Dokumen Kerjasama antara Systemiq dan Pemerintah Desa Tembokrejo untuk pelaksanaan plastic credit ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dokumen ini menjadi salah satu persyaratan pendaftaran program pada Lembaga Verifikasi Verra.
- Terlaksananya Pelatihan Penyegaran (Refresher Training) bagi Sanitarian Kab. Banyuwangi tentang Pemicuan STBM Pilar 4 menggunakan panduan yang selesai dirancang oleh Dinas Kesehatan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh tim Bappenas, Kementerian Kesehatan, USAID-Indonesia, USAID-Clean City Blue Oceans (CCBO) dan Dinas Kesehatan Kota Makassar - sebagai proses memahami panduan untuk diadopsi sebagai panduan nasional dan pelaksanaan pemicuan di Kota Makassar.
- Rancangan Kampanye Publik mendukung komunikasi perubahan perilaku tersusun melalui workshop diselenggarakan bersama Dinas Kesehatan yang dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika, Forum Banyuwangi Sehat, PKK, SIKIA, STIKES, Banyuwangi Youth Creative Network (BYCN). Rancangan ini juga didasarkan pada hasil Studi Formatif tentang Perilaku Pengelolaan Sampah di Tingkat Rumah Tangga yang diselenggarakan pada April-Juni 2022.
- Pelatihan Edukasi Pengelolaan Sampah di Sekolah bagi Promotor UKS Sekolah dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banyuwangi diselenggarakan oleh BWH. Kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan Guru UKS dari 12 sekolah di wilayah BWH oleh para Promotor UKS tersebut untuk melatih terkait pengelolaan sampah dan praktiknya di sekolah.



Foto 1. Peserta pertemuan refreshing Program STBM dan Pengenalan Panduan Pemicuan Pilar 4 STBM bersama tim Bappenas, USAID-CCBO dan Dinkes Kota Makassar, Oktober 2022.

1.2 Komunikasi

Pada periode laporan ini, Unit Komunikasi mengelola kegiatan dikaitkan dengan promosi program juga advokasi media untuk BWH dan tercatat 12 pemberitaan di media tentang kegiatan BWH.

Berikut adalah beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh unit ini:

- Terselenggaranya bootcamp bagi influencer tentang persampahan berkelanjutan terlaksana dan salah satu hasilnya adalah terbentuknya Pasukan Hijau, kelompok influencer muda yang akan mendukung pelaksanaan kampanye publik mendukung upaya perubahan perilaku yang dilakukan di tingkat rumah tangga. Agenda kegiatan jangka pendek juga direncanakan agar Pasukan Hijau yang terdiri dari perwakilan anak muda dari 6 kecamatan wilayah BWH, jurnalis, dan BYCN berkegiatan aktif.
- Terselenggaranya kunjungan belajar delegasi mitra nasional BWH untuk memahami penyelenggaraan Program Banyuwangi Hijau. Delegasi berasal dari Direktorat Perumahan dan Permukiman, Bappenas, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga, Kementerian Kesehatan, USAID-Indonesia Environmental Office, USAID-Clean City Blue Oceans (CCBO) dan Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Indonesia Solid Waste Management Program (Bank Dunia) pada awal Oktober 2022.
- Bersama Dinas Lingkungan Hidup merencanakan saluran komunikasi untuk kegiatan di BWH, dimana platform utama yang akan digunakan adalah website Dinas Lingkungan Hidup. Koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan agar website dengan halaman BWH siap digunakan pada Januari 2023.



Foto 2. Peserta Bootcamp BWH dalam sesi diskusi seusai kunjungan lapangan di Kecamatan Muncar, Agustus 2022.

KEGIATAN KOMPONEN PROGRAM

2.1. Komponen Tata Kelola & Kelembagaan

Komponen Tata Kelola dan Kelembagaan meneruskan proses penyiapan berbagai regulasi pendukung pelayanan sampah, menguatkan POKJA PKP yang telah disahkan pada September 2022 sekaligus memulai proses penyiapan desa untuk mendukung pengelolaan pelayanan persampahan oleh UPT Persampahan. Secara detil, berikut adalah kegiatan utama selama Juli hingga Oktober 2022:

1. **Bersama DLH menyiapkan anggaran operasional persampahan** yang akan diusulkan dalam proses penganggaran APBD 2023.
2. **Meneruskan pendampingan atas POKJA PKP yang sudah tersusun keanggotaannya dan memulai pembentukan Forum PKP** sebagai kelompok pendukung POKJA yang terdiri dari para pihak dari kelompok pemerintah maupun non-pemerintah serta menyiapkan kantor sekretariat.
3. **Memulai proses penyusunan peraturan bupati tentang Petunjuk Teknis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga** yang akan melengkapi Perda Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
4. **Draf Petunjuk Pelaksanaan Revisi Perda Retribusi Jasa Umum** telah diajukan untuk pengesahan, namun karena ada perubahan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, **maka sedang disusun regulasi pendukung tingkat kabupaten untuk pemberlakuan tarif jasa umum persampahan** dalam rangka mendukung operasionalisasi persampahan BWH.
5. **Proses penyiapan UPTD PKK BLUD** (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Persampahan) dimulai bersama DLH dan sektor terkait untuk memastikan operasionalisasi Lembaga dalam mendukung pengelolaan operator pengelola pelayanan sampah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.



Foto 3. Sekretaris Daerah Banyuwangi memberikan arahan dalam Rapat Pokja PKP pada Juli 2022 di Hotel Aston, Kab. Banyuwangi.

6. **Sosialisasi pelayanan persampahan** yang melibatkan pemerintah desa dilaksanakan oleh DPMD secara bertahap per kecamatan, dan melibatkan seluruh kepala desa, perangkat pemerintah desa, Puskesmas, PKK, juga organisasi non pemerintah yang ada di desa. Kegiatan ini melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan sebagai nara sumber komponen program yang esensial dalam pelaksanaan pelayanan sampah di desa.
7. Mendukung Dinas Lingkungan Hidup menyusun **usulan anggaran pengelolaan TPS** sebagai salah satu program **yang didanai oleh APBD tahun anggaran 2023**.
8. **Advokasi penganggaran kegiatan OPD untuk mendukung pelayanan persampahan pada 2023 dilakukan**, yaitu: alokasi pembiayaan STBM Pilar 4 oleh Dinas Kesehatan melalui DAK 2023 serta mendukung inisiatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk alokasi ADD Khusus bagi pemerintah desa lokasi BWH, termasuk penyiapan usulan anggaran kegiatan persampahan di desa melalui Dana Desa.

2.1. Komponen Sistem Operasional Persampahan

Pada periode ini komponen yang bertanggungjawab pada pengembangan desain dan pelaksanaan operasional persampahan ini fokus pada penyiapan berbagai dokumen sebagai syarat ijin pembangunan TPS yang akan dibangun di Desa Balak. Proses yang sudah dijalankan sejak Maret 2022 ini lebih lama dari yang diperkirakan karena proses penyiapan dokumen yang perlu waktu berikut tahapan-tahapan perijinannya. Pada bulan September, Dinas Lingkungan Hidup dan tim BWH mulai fokus pada proses penerbitan PBG dan diperkirakan ijin akan terbit pada Oktober 2022.

Proses perijinan yang membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan ini mengakibatkan mundurnya penyelesaian konstruksi TPS. Sementara itu, BWH juga mulai menyiapkan skenario pelayanan sampah yang diperkirakan akan terselenggara pada kuartal pertama 2023.

Sementara mendukung Dinas Lingkungan Hidup melakukan proses perijinan pembangunan TPS, berikut adalah kegiatan utama komponen ini :

1. Meneruskan proses penyiapan dokumen UKL-UPL Pembangunan TPS Desa Balak dilengkapi dengan koordinasi ketat dengan para pihak yang terlibat, dan di saat yang sama memantau dan mendukung proses pengajuan KKPR dan PBG yang melibatkan berbagai OPD.
2. Memantau proses pembelian perangkat pendukung sistem persampahan, termasuk melakukan pengecekan fisik atas contoh hasil produksi : kendaraan roda tiga, material conveyor, dan lainnya.
3. Mutual Check O (MC O) terlaksana - sebagai cara sinkronisasi antara hasil pengukuran riil dan rancangan desain. Dimana ditemukan kemudian beberapa perbedaan ukuran antara desain dan kondisi sebenarnya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian desain sebelum konstruksi. Diskusi dengan antara Dinas Lingkungan Hidup, tim komponen BWH, dan kontraktor dilakukan dan disepakati berbagai perubahan yang perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan nilai kontrak dan menyepakati perubahan yang akan dilakukan sekaligus menjadi
4. Menggunakan hasil Studi Analisa Wilayah Persampahan untuk mengembangkan skenario pelayanan sampah yang lebih detail, dimana ditemukan perbedaan nilai retribusi sampah, pelayanan pengumpulan sampah yang sudah diakses oleh masyarakat, juga kondisi fisik jalan di lokasi pelayanan sampah sebagai dasar pertimbangan rute pelayanan sampah.
5. Mendukung pengembangan konsep kolaborasi UPT dan Pemerintah Desa dalam pelayanan sampah di wilayah BWH, dimana para Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dilibatkan untuk membantu pemerintah desa mempersiapkan diri mendukung UPTD Persampahan melakukan pelayanan sampah. Pertemuan berseri diselenggarakan oleh DPMD untuk memastikan pemahaman Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa tentang perangkat regulasi, sumber daya dan pendanaan di tingkat desa untuk mendukung pelayanan persampahan pada tahun 2023.
6. Mendukung Dinas Lingkungan Hidup mempersiapkan pengelolaan suplai bahan bakar dan listrik untuk keperluan operasional persampahan berkoordinasi dengan PLN dan Pertamina.
7. Anggaran operasionalisasi TPS tersusun sebagai usulan penganggaran APBD tahun anggaran 2023.

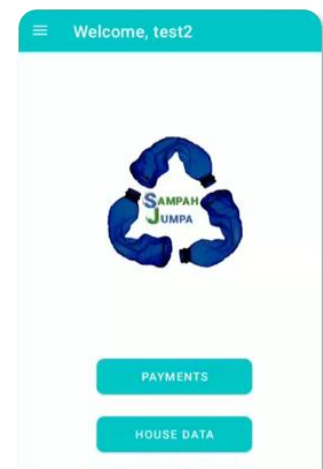


Foto 4. Aplikasi Pendaftaran Pelanggan dan Pencatatan Iuran berbasis Android Sampah Jumpa

8. Mengembangkan konsep aplikasi digital mendukung operasionalisasi pelayanan sampah BWH oleh UPT. Kunjungan ke Proyek STOP Pasuruan untuk mempelajari pengelolaan aplikasi digital SAMPAH JUMPA dilakukan dan proses adaptasi aplikasi ini akan dikembangkan untuk BWH.

2.2. Komponen Komunikasi Perubahan Perilaku

Selama Juli-September, komponen ini menyelesaikan beberapa keluaran yang merupakan pondasi penyelenggaraan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan persampahan di wilayah Banyuwangi Hijau. Salah satunya, strategi kampanye mulai disusun berdasarkan hasil analisa Studi Formatif Perilaku Pengelolaan Sampah di Tingkat Rumah Tangga. Penyusunan panduan Pemicuan STBM Pilar 4 untuk BWH terus dilakukan untuk memastikan detail berbagai aspek pelaksanaan pengelolaan sampah menjadi bagian dari isi panduan. Komponen ini juga terlibat aktif dalam upaya pelibatan desa dalam pelayanan sampah oleh UPT Persampahan. Berikut adalah detail kegiatan yang terlaksana:

1. Terlaksananya Pelatihan Penyegaran bagi Sanitarian Kab. Banyuwangi tentang Pemicuan STBM Pilar 4 menggunakan panduan yang selesai dirancang oleh Dinas Kesehatan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh tim Bappenas, Kementerian Kesehatan, USAID-Indonesia, USAID-CCBO dan Dinas Kesehatan Kota Makassar - sebagai proses memahami panduan untuk diadopsi sebagai panduan nasional dan dalam rangka pelaksanaan pemicuan menggunakan panduan yang sama di Kota Makassar. Masukan atas panduan yang digunakan pada pelatihan ini disampaikan oleh peserta pelatihan yang akan diakomodasi untuk perbaikan panduan.
2. Laporan hasil Studi Formatif Pengelolaan Persampahan di Tingkat Rumah Tangga yang diselenggarakan pada April-Juni selesai disusun oleh tim Konsultan Peneliti dan dipresentasikan pada Workshop Penyusunan Strategi Kampanye Publik. Laporan ini juga dikonsultasikan kepada Dinas Kesehatan (Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat) dan Dinas Lingkungan Hidup.
3. Rancangan Kampanye Publik mendukung komunikasi perubahan perilaku tersusun melalui workshop diselenggarakan bersama Dinas Kesehatan yang dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika, Forum Banyuwangi Sehat, PKK, SIKIA, STIKES, Banyuwangi Youth Creative Network. Rancangan ini juga didasarkan pada hasil Studi Formatif tentang Perilaku Pengelolaan Sampah di Tingkat Rumah Tangga.

4. Materi Edukasi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan untuk Sekolah selesai disusun dengan dukungan dari Komponen Sistem Operasional Sampah dan diserahkan kepada STIKES untuk digunakan sebagai referensi pelaksanaan edukasi pengelolaan sampah Program UKS di sekolah.

5. Pelatihan Edukasi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan bagi Promotor UKS Sekolah dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banyuwangi diselenggarakan oleh BWH. Kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan Guru UKS dari 12 sekolah di wilayah BWH oleh para Promotor UKS tersebut untuk melatih terkait pengelolaan sampah dan praktiknya di sekolah. Perwakilan DLH turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan pelatihan untuk memberikan masukan teknis pelayanan sampah di Kab. Banyuwangi.



Foto 5. Guru UKS peserta pelatihan Edukasi Sampah dan Pelaksanaannya di Sekolah mengunjungi TPS3R Tembokrejo sebagai salah satu kegiatan pelatihan untuk memahami sistem pengelolaan sampah berkelanjutan yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Kesehatan Banyuwangi.

2.3. Komponen Inovasi Pendanaan

Komponen Inovasi Pendanaan bertujuan mengembangkan opsi mekanisme pendanaan untuk menyeimbangkan investasi belanja modal bagi infrastruktur pengelolaan sampah serta berkontribusi pada pengembangan aliran pendapatan yang stabil untuk membiayai operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) melalui penjualan sampah. Komponen juga mengembangkan pendekatan pengelolaan usaha komoditi persampahan melalui pengembangan model blended finance bersama Kemenkomarves, yang melibatkan kabupaten/kota lainnya. Berikut adalah beberapa keluaran utama selama periode pelaporan yang berkontribusi pada pengelolaan sampah BWH:

1. Kesepakatan dengan Pemerintah Desa Tembokrejo sebagai pendukung penerapan plastic credit pada program telah ditandatangani. Hal ini adalah salah satu syarat pendaftaran di lembaga verifikasi Verra untuk plastic credit. Sementara itu proses penyiapan berbagai dokumen lain juga dilakukan agar persyaratan bisa dilengkapi dan registrasi bisa dilakukan.
2. Kegiatan memasarkan plastic credit kepada para pihak untuk mendapatkan pemanfaat kredit ini terus dilanjutkan.
3. Pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion tentang konsep blended finance yang dikembangkan Systemiq dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak sebelum disosialisasikan ke berbagai pihak. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemenkomarvest ini akan dilanjutkan dengan sosialisasi konsep blended finance untuk persampahan, sebagai salah satu side event acara G20 di Bali pada Desember mendatang.
4. Pelatihan pemilahan sampah diselenggarakan bekerjasama dengan Bank Sampah Kab. Banyuwangi yang diikuti oleh para pegiat sampah (non pemerintah) di Kabupaten Banyuwangi. Pelatihan ini dilaksanakan agar kualitas sampah yang dihasilkan oleh peserta pelatihan lebih baik sehingga meningkatkan kualitas sampah yang bisa didaur-ulang dan bernilai jual lebih tinggi.



Foto 6. Peserta Focus Group Discussion (FGD) Skema Pembiayaan Infrastruktur Pengelolaan Sampah di Jakarta pada Oktober 2022.

TANTANGAN DAN REKOMENDASI

Tantangan

- Proses perijinan pembangunan TPS membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Ini mempengaruhi tenggat waktu untuk : (1) pelayanan sampah kepada masyarakat dan (2) penyerapan dana hibah yang membiayai semua komponen program.
- Ketidakpastian perijinan tersebut di atas berimbas pada perencanaan kegiatan Komponen Komunikasi Perubahan Perilaku, dimana pelayanan sampah harus didahului dengan kampanye dan pemicuan perilaku pengelolaan sampah yang benar di lokasi BWH.
- Beberapa regulasi kabupaten yang esensial untuk pelaksanaan pengelolaan persampahan pada BWH perlu perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Diantaranya: petunjuk teknis pengelolaan persampahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, peraturan bupati terkait retribusi sampah, pengesahan UPT PPK BLUD yang proses pengembangan persyaratan pembentukannya sedang berlangsung pada periode laporan. Tim BWH dan para OPD terkait berkoordinasi ketat untuk memastikan regulasi tersebut tersusun sesuai waktu yang dibutuhkan, namun hal ini akan tetap membutuhkan perhatian khusus dengan dedikasi tim lintas sektor.

Rekomendasi untuk Perbaikan

- Komunikasi dan pemantauan proses perijinan dilakukan dengan intensif dengan para pihak untuk memastikan semua kebutuhan terpenuhi hingga proses tidak tersendat. Termasuk merancang penyelesaian konstruksi agar tidak terlalu jauh dari tenggat waktu yang ditentukan dan mengembangkan skenario pelayanan sampah memperhatikan kesiapan TPS dengan melibatkan OPD terkait.
- Skenario pelaksanaan kegiatan komunikasi perubahan perilaku didiskusikan dengan Komponen Sistem Operasional Persampahan dan Komponen Tata Kelola dan Kelembagaan. Hal ini untuk memastikan sinkronnya hasil semua komponen dan akan mendorong pengelolaan sampah yang lebih baik di tingkat rumah tangga.
- Koordinasi melekat dengan OPD terkait untuk penyusunan berbagai regulasi dan pengesahannya dilakukan secara konsisten oleh Komponen Tata Kelola dan Kelembagaan, sehingga semua regulasi yang dibutuhkan terbit pada waktu yang diharapkan.

KEGIATAN NOVEMBER-DESEMBER

Berikut adalah kegiatan yang direncanakan dilaksanakan pada periode November-Desember 2022:

1. Mendampingi DLH dalam penyusunan draft Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga beserta perangkat daerah lainnya.
2. Menyusun dokumen teknis penerapan PPK BLUD pada UPT Pengelolaan Persampahan DLH Kabupaten Banyuwangi yang diharapkan dapat di sahkan pada bulan Desember 2022
3. Menyusun draf peraturan bupati tentang penerapan PPK BLUD, khususnya tentang Tata Kelola, Rencana Strategis, dan Standard Pelayanan Minimal UPT PPK BLUD
4. Mengembangkan kolaborasi desa untuk mendukung pengelolaan pelayanan persampahan di wilayah BWH.
5. Melaksanakan konstruksi TPS dengan strategi percepatan pembangunannya.
6. Menyiapkan materi peningkatan kapasitas untuk aspek pengarus-utamaan kebijakan dan pengelolaan pelayanan persampahan.
7. Menyiapkan mekanisme penarikan iuran pelayanan persampahan.
8. Reviu panduan Pemicuan untuk STBM Pilar 4 sesuai hasil pelatihan Fasilitator STBM.
9. Merencanakan pelaksanaan Program STBM Pilar 4 untuk mendukung penyiapan pelayanan persampahan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.
10. Finalisasi strategi kampanye mendukung kegiatan komunikasi perubahan perilaku melalui pelaksanaan STBM Pilar 4.
11. Melaksanakan sosialisasi skema blended finance infrastruktur persampahan dengan lembaga pembiayaan pada acara G20 di Bali.
12. Menyelesaikan buku putih untuk mempromosikan skema blended finance pembiayaan infrastruktur pengumpulan sampah di Indonesia.
13. Memfasilitasi diskusi antara mitra pembiayaan yang tertarik dengan skema blended finance dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya.
14. Melanjutkan proses pendaftaran proyek dengan Verra untuk plastic credit.